



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

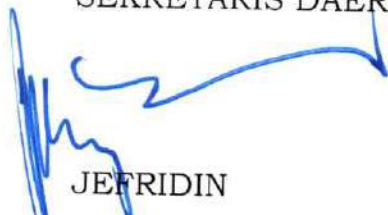
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1523



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

TAHUN 2024

<https://disnaker.batam.go.id>

Jl. Raja Haji no. 1 Sungai Harapan - Sekupang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP.19650606 199303 1 01

Paraf Hierarki	
Sekdis.....	
Kasubbag 	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABLE	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	10
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II	12
BAB III.....	26
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA	26
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.....	26
3.2 Perubahan Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	27
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	38
BAB IV.....	47
PENUTUP.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	4
Gambar 1.2 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	13
Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	26
Table 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024	31
Table 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD dan RPJMD sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) terdiri atas Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

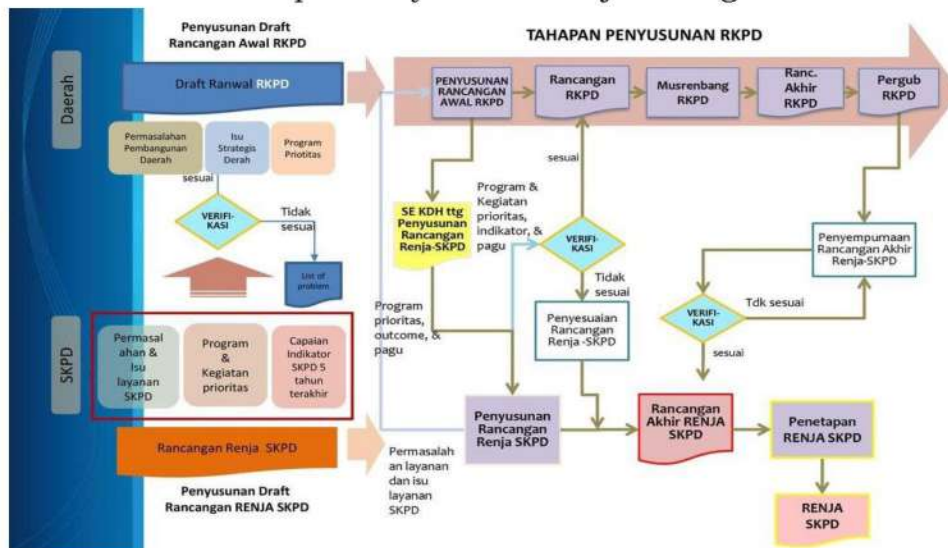
Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, serta menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan

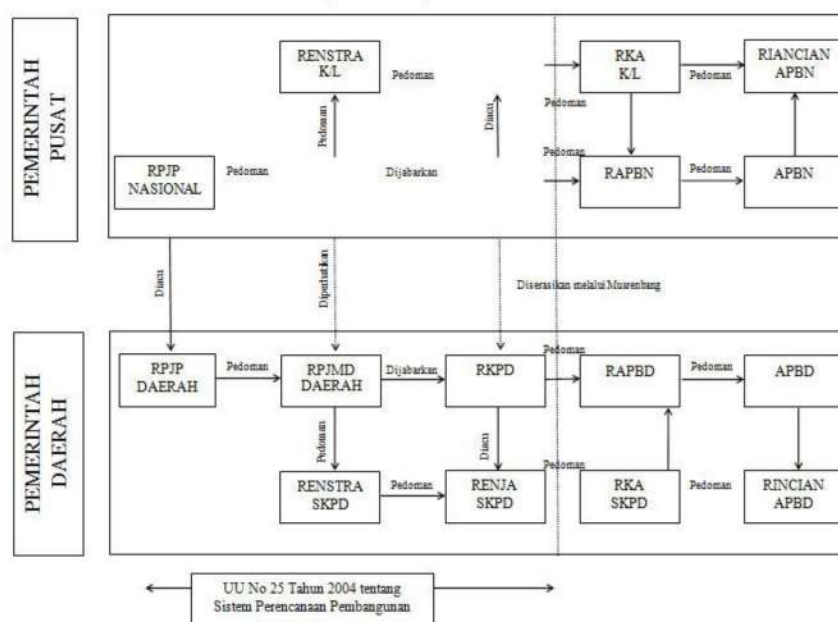
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar1.1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Gambar1.2 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2024, dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9887 dan 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

- s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- t. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
- u. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- v. Peraturan Wali Kota Batam nomor 84 tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk menyinkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
- 3.2 Perubahan Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang tenaga kerja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah /Kabupaten Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah /Kabupaten Kota merupakan jenis belanja langsung yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Tenaga Kerja dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.229.129.661, - (50.98%) dari

target Rp 6.258.921.015, - (51.23%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 51.78% dari target 100% (51.78%).

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi ; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ; Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 11.623.865.350,- (57,09%) dari target Rp. 11.7873.407.564,- (58,31%). Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 91,81% dari target 100% (91,81%).

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kemajuan Keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 146.000.400,- (46,20%). dari target sebesar Rp. 194.526.000,- (61,55%). Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 48,10% dari target 100% (48,10%).

4. Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota. Kemajuan Keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 133.064.000,- (47.28%) dari target sebesar Rp. 120.7194.000,- (42.70%). Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 58.84% dari target 100% (58,84%).

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II

Untuk dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2024 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengelola anggaran sebesar Rp. 33.981.599.326,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 33.184.053.386,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.833.545.940,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Table 2.1 Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	6			7			8		9		10
1		DINAS TENAGA KERJA												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	65.314.516.992,00	Persentase	100%	14.525.525.688,00	51,78%	6.229.129.661,00	51,78%	42,88%	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	52.572.059.147,00	Persentase	100%	9.882.461.935,00	100%	5.383.599.398,00	100%	54,47%	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/Bulan	53	9.882.461.935,00	53	5.383.599.398,00	100%	54,47%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												Menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019, Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Di satukan di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	2.785.039.175,00	Persentase	100%	852.003.000,00	59%	355.165.100,00	54,57%	41,69%	
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1	5.627.000,00	1	1.628.000,00	100%	28,93%	Kegiatan sudah selesai (sesuai pagu anggaran APBD)
	2.07.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	4	273.122.000,00	3	171.809.500,00	75%	62,90%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	2	119.885.000,00	2	54.400.000,00	100%	45,37%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				Dokum en	3	3.600.000,00	3	1.250.000,00	100,00%	34,72%	Dalam proses pelaksanaan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.07.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan	12	449.769.000,00	6	126.077.600,00	50%	28,03%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
			Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	1.339.920.500,00	Persentase	100%	249.486.000,00	100%	82.720.000,00	16,66%	33,15%	
	2.07.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	24	249.486.000,00	4	82.720.000,00	16,66%	33,15%	Kegiatan sudah selesai (sesuai pagu anggaran APBD)
	2.07.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	4.853.465.280,00	Persentase	100%	597.275.184,00	52%	203.219.863,00	52%	41,62%	
	2.07.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan	12	254.961.600,00	6	68.132.091,00	50%	26,72%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	13	342.313.584,00	7	135.087.772,00	53,84%	39,46%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase	100	2.946.728.128,00	Persentase	100%	2.944.299.569,00	32,40%	204.425.300,00	6,94%	32,40%	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.07.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Unit	5	178.510.000,00	5	62.189.300,00	100%	34,83%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	102	137.260.000,00	30	22.550.000,00	29,41%	16,42%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	1	2.628.529.569,00	0	119.686.000,00	0%	4,55%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	Persen tase	100	265.641.200,00	Persen tase	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
	2.07.0 2.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)												
			Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Buku	20	265.641.200,00		0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
	2.07.0 2.2.01. 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro												
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Kegiatan sudah dilaksanakan Tahun 2022
	2.07.0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen tase	20,77	104.257.244.647,0 0	Persen tase	18,32%	18.405.523.638,00	21,16%	4.642.523.638,00	115,50 %	63,15%	
	2.07.0 3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen tase	20	48.814.066.833,00	Persen tase	18%	8.347.621.958,00	20,97%	6.067.635.350,00	116,50 %	72,69%	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.07.0 3.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi												
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				Orang	815	8.347.621.958,00	856	6.067.635.350,00	105%	72,69%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 3.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
			Persentase LPK yang terakreditasi	Persentase	14	3.469.283.575,00	Persentase	16,37%	432.150.000,00	0	00	0%	0%	
	2.07.0 3.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				Lemba ga	10	432.150.000,00	0	00	0%	0%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 3.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	Persentase	3	51.973.894.239,00	Persentase	0,38	9.625.751.680,00	0,19%	5.556.230.000,00	50%	57,72%	
	2.07.0 3.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga				Dokum en	821	9.625.751.680,00	548	5.556.230.000,00	66,75%	57,72%	Dalam proses pelaksanaan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Kerja di Tingkat Daerah											
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
			Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	Persen tase	54	2.555.133.300,00	Persen tase	52	758.713.500,00	50,32%	146.000.400,00	96,77%	19,24%	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota												
			Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	Persen tase	100	502.843.300,00	Persen tase	11.76	150.000..000,00	11.76	69.166.400,00	100%	46,11%	
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan												
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				Orang	10	150.000..000,00	10	69.166.400,00	100%	46,11%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
			Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	Persen tase	50	1.109.540.000,00	Persen tase	30	420.163.500,00	25	62.833.000,00	57,78%	14,95%	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.07.0 4.2.03. 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				Orang	1200	121.908.000,00	3000	62.833.000,00	150%	51,54%	Dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 4.2.03. 03	Job Fair/ Bursa Kerja												
			Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja				Orang	800	298.255.500,00	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan TA. 2025
	2.07.0 4.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota												
			Persentase cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	Persen tase	100	518.425.000,00	Persen tase	18,29%	188.550.000,00	18,29%	4.520.000,00	100%	7,43%	
	2.07.0 4.2.04. 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran												
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang				Orang	100	188.550.000,00	10	14.001.000,00	100%	7,43%	Masih dalam proses pelaksanaan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Ditangani											
	2.07.0 4.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	Persentase	25	424.325.000,00	Persentase	0	0		0,00	0,00%	0,00%	
	2.07.0 4.2.05. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangsan IMTA yang dilaksanakan				Orang	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Sub kegiatan sudah dihapus berdasarkan Kepmendagri 9887 dan 900.1.15.5-1317 tahun 2023
	2.07.0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase	99	980.505.101,00	Persentase	97%	291.836.500,00	65%	120.632.000,00	50,00%	31,40%	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	2.07.0 5.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	Persen tase	100	361.465.884,00	Persen tase	100%	210.000.000,00	50%	113.824.000,00	50,00%	54,20%	
	2.07.0 5.2.01. 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				Lapora n	10	210.000.000,00	5	113.824.000,00	50,00%	54,20%	Masih dalam proses pelaksanaan
	2.07.0 5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2024		Keterangan
1	2	3	4	6			7			8		9		10
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Persentase	96	619.039.217,00	Persentase	98%	81.836.500,00	51%	19.240.000,00	52,04%	23,51%	
	2.07.0 5.2.02. 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				Lemba ga	1	81.836.500,00	1	19.240.000,00	100%	23,51%	Dalam proses pelaksanaan
Total									33.981.599.326,00		18.132059.411,0 0			
												63,06%	53,36%	
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Terdapat 5 (lima) misi Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dimana yang terkait dengan Ketenagakerjaan adalah Misi ke – 3 yaitu :

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu *Menurunnya angka pengangguran*. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bisa dilihat pada Tabel 2 berikut.

Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam		Tingkat Pengangguran Terbuka	11%	10%	9%	8%	7%	6%
		Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Penurunan jumlah pengangguran	11%	10%	9%	8%	7%	6%
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	96%	97%	98%	99%	100%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif berupa upaya

kebijakan, strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan dengan melihat kepada isu – isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan di Kota Batam.
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha
4. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak
5. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.

3.2 Perubahan Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, hal ini untuk menyesuaikan dana APBD dari pagu awal Rp. 33,981,599,326 menjadi Rp.34,510,979,306.

Adapun rincian program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengalami perubahan antara lain meliputi:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penunjang urusan administrasi perkantoran untuk aparatur dalam pelaksanaan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14,525,525,688 mengalami perubahan menjadi Rp. 12,725,627,150 dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9,882,461,935 mengalami perubahan menjadi Rp. 10,595,214,961 (terjadi penambahan sebesar Rp. 712.753.026).
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 852,003,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 539,896,000 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 312.107.000).
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 249,486,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 90,07,000 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 159.416.000).
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 597,275,184 mengalami perubahan menjadi Rp. 486,558,560 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 110.716.624).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2,944,299,569 mengalami perubahan menjadi Rp. 1,013,887,629 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.930.411.490).

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan pagu sebesar Rp. 18,405,523,638 mengalami perubahan menjadi Rp. 21,110,775,956 dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Rp. 8,347,621,958 mengalami perubahan menjadi Rp.

- 12,441,359,118 (terjadi penambahan sebesar Rp. 4.093.737.160).
2. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 9,625,751,680 mengalami perubahan menjadi Rp. 8,410,516,838 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.215.234.842).
 3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp. 432,150,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 258,900,000 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 173.250.000).

3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan terciptanya usaha mandiri dengan pagu indikatif sebesar Rp. 758,713,500 mengalami perubahan menjadi Rp. 344,133,200 dengan kegiatan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota pagu semula sebesar Rp. 150,000,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 151,675,200 (terjadi penambahan sebesar Rp. 1.675.200).
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan pagu sebesar Rp. 420,163,500 mengalami perubahan menjadi Rp. 121,908,000 (terjadi pengurangan sebesar Rp. 298.255.500).
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 188,550,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 70,550,000 (terjadi pengurangan sebesar Rp.118.000.000).

4. Program Hubungan Industrial.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan penerima kerja sehingga tercipta hubungan kerja yang kondusif dan harmonis dengan pagu

sebesar Rp. 291,836,500 mengalami perubahan menjadi Rp. 330,443,000 dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 210,000,000 mengalami perubahan menjadi Rp. 239,603,000 (terjadi penambahan sebesar Rp. 29.603.000).
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 81,836,500 mengalami perubahan menjadi Rp. 90,840,000 (terjadi penambahan sebesar Rp. 9.003.500).

Daftar Perubahan Belanja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagaimana table berikut:

Table 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Tenaga Kerja (Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	14,525,525,688	12,725,627,150	
		1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	9,882,461,935	10,595,214,961	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/ bulan	54 orang/ bulan	9,801,10,935	10,595,214,961	Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	81,360,000	0	Menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019, Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Di satukan di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	852,003,000	539,896,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,627,000	1,844,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	273,122,000	205,765,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	119,885,000	98,605,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3,600,000	3,600,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	449,769,000	230,082,000	
		3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	249,486,000	90,07,000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	4 Unit	249,486,000	90,07,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	597,275,184	486,558,560	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	254,961,600	232,836,400	Penyesuaian anggaran biaya listrik dan air
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	342,313,584	253,722,160	Penyesuaian Anggaran Gaji THD
		5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	2,944,299,569	1,013,887,629	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	178,510,000	178,510,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	4 unit	137,260,000	70,700,000	Rasionalisasi anggaran

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2,628,529,569	764,677,629	Rasionalisasi anggaran
2.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	18.32%	18.32%	18,405,523,638	21,110,775,956	
		7.Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	7.Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	18%	18%	8,347,621,958	12,441,359,118	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	815 orang	1188 orang	8,347,621,958	12,441,359,118	Penambahan biaya pelatihan
		8.Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	16,67%	16,67%	432,150,000	258,900,000	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	10 Lembaga	432,150,000	258,900,000	Sebagian kegiatan dialihkan ke kegiatan pencaker
		10.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0.38%	0.38%	9,625,751,680	8,410,516,838	

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	821 Dokumen	686 Dokumen	9,625,751,680	8,410,516,838	Sebagian kegiatan dialihkan ke kegiatan pencaker
3.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempat	52%	52%	758,713,500	344,133,200	
		11.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	11.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	11,79%	11,79%	150,000,000	151,675,200	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 orang	10 orang	150,000,000	151,675,200	Penambahan biaya honor pendampin disabilitas
		12.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	45%	45%	420,163,500	121,908,000	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	1200 Orang	121,908,000	121,908,000	
		Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	-	298,255,500	0	Rasionalisasi anggaran

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	13.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	18,29%	18,29%	188,550,000	70,550,000	
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah Ditangani	100 Orang	100 Orang	188,550,000	70,550,000	Rasionalisasi anggaran
4.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98%	98%	291,836,500	330,443,000	
		15.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	100%	210,000,000	239,603,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2024	Perubahan Renja 2024		Renja 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10 Laporan	210,000,000	239,603,000	Penambahan kubutuahn komsumsi petugas lapangan rapat penentuan UMK
		16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	98%	98%	81,836,500	90,840,000	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartif yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	81,836,500	90,840,000	Penyesuaian biaya honor LKS Tripartit
							33,981,599,326	34,510,979,306	

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Daftar Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 (perubahan) dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Batam	100%	14,525,525,688	100%	12,725,627,150		Daerah	ASN/ Dinas Tenaga Kerja	100%	11.752.745.908
X.XX.1.2 02	1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	9,882,461,935	100%	10,595,214,961				100%	9.157.374.158
X.XX.1.2 02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 orang/ bulan	9,801,10,,935	54 orang/ bulan	10,595,214,961				61Oran / Bulan	9.157.374.158
X.XX.1.2 02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokum en	81,360,000	-	0				-	0
X.XX.1.2 05	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	852,003,000	100%	539,896,000				100%	589.157.715
X.XX.1.2 05.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,627,000	1 Paket	1,844,000				1 Paket	5.627.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.1.2 05.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	273,122,000	4 Paket	205,765,000				4 Paket	115.546.965
X.XX.1.2 05.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	119,885,000	2 Paket	98,605,000				2 Paket	312.273.750
X.XX.1.2 05.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokum en	3,600,000	3 Dokum en	3,600,000				3 Dokume n	3.600.000
X.XX.1.2 05.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lapora n	449,769,000	12 Lapora n	230,082,000				12 Laporan	152.110.000
X.XX.1.2 07	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	249,486,000	100%	90,07,000				100%	238.636.100
X.XX.1.2 07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24 Unit	249,486,000	4 Unit	90,07,000				9 Unit	238.636.100
X.XX.1.2 08	4.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	597,275,184	100%	486,558,560				100%	767.357.979

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.1.2 08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lapora n	254,961,600	12 Lapora n	232,836,400				12 Laporan	254.961.600
X.XX.1.2 08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Lapora n	342,313,584	13 Lapora n	253,722,160				13 Laporan	512.396.379
X.XX.1.2 09	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	2,944,299,569	100%	1,013,887,629				100%	636.237.575
X.XX.1.2 09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit	178,510,000	5 unit	178,510,000				5 Unit	178.510.000
X.XX.1.2 09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		102 unit	137,260,000	102 unit	70,700,000				55 Unit	36.340.000
X.XX.1.2 09.9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	2,628,529,569	1 Unit	764,677,629				1 Unit	421.387.575

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		18,32 %	18,405,523,638	18,32 %	21,110,775,956	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadi lan	01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi.	Pencari Kerja	19,59%	19.084.693.082
2.07.03. 2.01	7.Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		18%	8,347,621,958	18%	12,441,359,118				22%	8.597.622.397
2.07.03.2 .01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		815 orang	8,347,621,958	1188 orang	12,441,359,118				900 orang	8.347.622.397
2.07.03. 2.02	8.Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi		16,67 %	432,150,000	16,67 %	258,900,000	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit as dan Berkeadi lan	01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan Ekono mi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16,67%	620.668.895

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.03.2 .02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		10 Lembag a	432,150,000	10 Lembag a	258,900,000				10 Lembag a	620.668.895
2.07.03. 2.04	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultansi									20%	250.000.000
2.07.03.2 .04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas									100 Perusah aan	250.000.000
2.07.03. 2.05	10.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi		0.38%	9,625,751,680	0.38%	8,410,516,838			Tenaga Kerja	0.49%	9.616.401.790
2.07.03.2 .05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		821 Dokum en	9,625,751,680	686 Dokum en	8,410,516,838				1400 Dokume n	9.616.401.790
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempat		52%	758,713,500	52%	344,133,200				53%	528.546.524
2.07.04. 2.01	11.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultansi		11,79 %	150,000,000	11,79 %	151,675,200			Tenaga Kerja Disabilitas	29,41%	118.088.524

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.04.2 .01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		10 orang	150,000,000	10 orang	151,675,200				25 orang	118.088.524
2.07.04. 2.03	12.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		45%	420,163,500	45%	121,908,000			Pencari Kerja/Per usahaan	50%	221,908,000
2.07.04.2 .03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1200 Orang	121,908,000	1200 Orang	121,908,000				1200 Orang	121.908.000
2.07.04.2 .03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja		800 Orang	298,255,500		0					100.000.000
2.07.04. 2.04	13.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		18,29 %	188,550,000	18,29 %	70,550,000			Calon Pekerja Migran Indonesia	21,95%	188,550,000
2.07.04.2 .04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah Ditangani		100 Orang	188,550,000	100 Orang	70,550,000	Memperk uat Ketahan an Ekonomi Untuk Pertumb uhan Yang Berkualit	01. Percep atan Pemuli han dan Pemera taan Pemba ngunan	Calon Pekerja Migran Indonesia	360 Orang	188,550,000

Kode	Urusan /Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								as dan Berkeadi lan	Ekono mi			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan		98%	291,836,500	98%	330,443,000				98%	156,850,629
2.07.05. 2.01	15.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	210,000,000	100%	239,603,000				100%	79,749,289
2.07.05.2 .01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Lapora n	210,000,000	10 Lapora n	239,603,000		Daerah	Perusahaa n	10 Laporan	79,749,289
2.07.05. 2.02	16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		98%	81,836,500	98%	90,840,000				98%	77,101,340

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja				Nasional	Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Murni		Perubahan						
				Kinerja	Pagu Indikatif	Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											
2.07.05.2 .02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartif yang Dibina		1 Lembag a	81,836,500	1 Lembag a	90,840,000			Tenaga Kerja/Per usahaan	1 Lembag a	77,101,340
					33,981,599,326		34,510,979,306			Total		31,522,836,143

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Batam Tahun 2024 dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PRAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Batam, 12 Juli 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP.19650606 199303 1
018